

PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN FINTECH DI INDONESIA

Application of the Rule of Reason Approach to Proving Interest Rate Cartel Cases Involving Fintech Companies in Indonesia

Kori Rahadi Purnumo^{1*}

Muhammad Yusman²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
korirahadi975@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Pembuktian dugaan kartel suku bunga pada perusahaan fintech menghadapi persoalan hubungan antara kesepakatan pelaku usaha, karakter layanan pendanaan digital, dan pembatasan manfaat ekonomi oleh regulator. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pendekatan *rule of reason* serta merumuskan parameter pembuktian yang dapat membedakan koordinasi antipersaingan dari perilaku paralel yang mempunyai penjelasan sah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan dengan memisahkan pembuktian perjanjian, kualifikasi pasal, serta penilaian akibat terhadap persaingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan analisis ekonomi tidak selalu berarti penerapan *rule of reason*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga perlu dibedakan dari Pasal 11 mengenai kartel; penerapan Pasal 11 pada jasa pendanaan juga memerlukan argumentasi terhadap lingkup rumusan normanya. Kesamaan tarif atau kepatuhan terhadap batas maksimum tidak cukup untuk membuktikan kesepakatan. Pembuktian perlu menghubungkan bukti komunikasi, keputusan internal, data transaksi yang sebanding, dan pengujian terhadap penjelasan alternatif. Artikel menawarkan kerangka analisis yang memperhatikan pasar bersangkutan, total biaya pendanaan, sumber kewenangan pengaturan, serta hak pelaku usaha untuk membantah. Kesimpulan mengenai pelanggaran hanya dapat ditarik setelah unsur pasal dan hubungan antara bukti dengan perilaku masing-masing perusahaan dijelaskan secara memadai.

Kata Kunci:

Rule of Reason
Hukum Persaingan Usaha
Pembuktian Kartel

Keywords:

Rule of Reason
Competition Law
Cartel Evidence

Abstract

Proving alleged interest-rate cartels among fintech companies requires careful analysis of business agreements, digital funding services, and regulatory limits on economic benefits. This article examines the role of the rule of reason and develops evidentiary criteria for distinguishing anticompetitive coordination from parallel conduct with lawful explanations. It employs normative legal research through statutory and conceptual approaches. The analysis separates proof of agreement, the choice of legal provision, and assessment of competitive effects. The findings indicate that economic analysis does not necessarily constitute a rule-of-reason assessment. Article 5 of Law Number 5 of 1999 on price fixing must be distinguished from Article 11 on cartels, whose application to funding services also requires justification concerning its statutory scope. Similar rates or compliance with a regulatory ceiling alone cannot establish an agreement. Evidence should connect communications, internal decisions, comparable transaction data, and tests of alternative explanations. The article proposes an analytical framework addressing the relevant market, total funding costs, regulatory authority, and the right to challenge evidence. A finding of infringement requires a reasoned demonstration of each statutory element and the conduct attributable to each company.

PENDAHULUAN

Layanan keuangan berbasis teknologi menyediakan cara baru untuk mempertemukan kebutuhan pendanaan dengan sumber dana. Dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, biaya yang dibayar penerima dana dapat terdiri atas beberapa komponen yang tidak seluruhnya disebut bunga. Keadaan ini menimbulkan persoalan ketika terdapat dugaan bahwa sejumlah penyelenggara mengoordinasikan tarif atau komponen biaya. Penilaian hukum tidak cukup dilakukan dengan membandingkan angka yang tampil pada aplikasi. Pemeriksaan perlu menjelaskan siapa yang menentukan harga, apa objek kesepakatan, dan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi ruang persaingan.

Istilah perusahaan fintech dalam judul mempunyai cakupan luas. Artikel ini membatasinya pada penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI, khususnya layanan konvensional yang berkaitan dengan biaya pendanaan. Pembatasan diperlukan karena layanan pembayaran, pengelolaan investasi, dan pendanaan tidak mempunyai struktur usaha yang sama. Pembahasan tidak dimaksudkan untuk menyatakan seluruh jenis fintech berada dalam satu pasar bersangkutan. Penetapan pasar tetap memerlukan analisis substitusi produk, karakter pengguna, dan kondisi transaksi yang relevan dengan dugaan pelanggaran.

Dalam literatur hukum persaingan usaha, pembahasan perjanjian yang dilarang mencakup penetapan harga dan kartel sebagai kategori yang perlu dibedakan. Rachmadi Usman menempatkan kedua kategori tersebut dalam pembahasan perjanjian antarpelaku usaha. Pembedaan konseptual ini penting karena istilah kartel sering dipakai secara umum untuk menyebut berbagai koordinasi horizontal, sementara dasar pembuktian tetap bergantung pada rumusan pasal yang digunakan.

Persoalan pertama terletak pada pemilihan pendekatan. Rule of reason menghendaki penilaian terhadap dampak pembatasan persaingan dalam konteks yang relevan. Namun, tidak semua larangan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 menempatkan akibat sebagai unsur yang harus dibuktikan dengan cara yang sama. Jika peneliti langsung menggunakan pendekatan tersebut hanya karena judul perkara menyebut kartel, analisis berisiko mengabaikan perbedaan antara penetapan harga dan pengaturan produksi atau pemasaran. Ketepatan pendekatan karena itu harus mengikuti identifikasi norma, bukan mendahuluinya.

Aryadiputra, Pribadi, dan Subroto membahas perbedaan penggunaan per se illegal dan rule of reason dalam putusan terkait penetapan harga. Salah satu persoalan yang mereka soroti ialah munculnya analisis ekonomi dalam perkara Pasal 5. Artikel ini mengambil titik tolak bahwa analisis ekonomi dapat memiliki fungsi yang berbeda: membantu membuktikan adanya perjanjian atau menilai akibat antipersaingan. Kedua fungsi tidak boleh dicampur tanpa penjelasan.

Persoalan kedua muncul dari regulasi sektor keuangan. Batas maksimum manfaat ekonomi dapat menyebabkan sejumlah tarif terlihat berdekatan, meskipun perusahaan mengambil keputusan secara mandiri. Sebaliknya, keberadaan batas maksimum juga dapat dipakai sebagai titik acuan koordinasi apabila pelaku usaha menyepakati tarif atau melarang persaingan di bawahnya. Dua kemungkinan ini harus diperiksa dengan bukti. Kepatuhan terhadap batas regulator bukan bukti otomatis adanya kartel, tetapi juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh komunikasi antarperusahaan mengenai harga dapat dibenarkan.

Anggraini menekankan pentingnya bukti ekonomi yang dilengkapi bukti lain dalam pembuktian kartel. Pandangan tersebut mengingatkan bahwa pola harga mempunyai arti apabila ditempatkan dalam hubungan yang dapat dijelaskan dengan perilaku pelaku usaha. Dalam perkara pendanaan digital, hubungan itu membutuhkan penilaian yang lebih rinci karena profil risiko, tenor, biaya layanan, dan sumber dana dapat berbeda antarpinjaman.

Penelitian ini merumuskan dua persoalan. Pertama, bagaimana kedudukan dan batas penerapan rule of reason dalam dugaan kartel suku bunga oleh penyelenggara fintech di Indonesia? Kedua, bagaimana parameter pembuktian dapat

menghubungkan kesepakatan, bukti ekonomi, dan akibat terhadap persaingan secara dapat dipertanggungjawabkan? Kontribusi artikel berupa kerangka pemeriksaan normatif yang menjaga ketepatan kualifikasi hukum dan menguji penjelasan alternatif. Artikel tidak menetapkan kesalahan perusahaan tertentu ataupun menyatakan status akhir suatu perkara yang tidak dianalisis berdasarkan salinan putusan lengkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU Nomor 5 Tahun 1999 beserta perubahan yang relevan, terutama melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta pengaturan sektor LPBBTI. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas perjanjian horizontal, per se illegal, rule of reason, pasar bersangkutan, dan bukti tidak langsung. Buku dan artikel jurnal merupakan bahan hukum sekunder. Sesuai format penulisan, catatan kaki hanya memuat buku dan jurnal; rujukan peraturan dicantumkan langsung dalam uraian.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan memisahkan isu kualifikasi norma dari isu pembuktian fakta. Pada tahap pertama ditentukan unsur yang perlu dibuktikan menurut dasar pelanggaran. Tahap berikutnya menilai fungsi setiap kelompok bukti terhadap unsur tersebut. Analisis kemudian menguji apakah dugaan koordinasi masih dapat dijelaskan oleh keputusan mandiri, perubahan biaya, komposisi pengguna, atau kewajiban regulator. Teknik ini dipakai untuk menghasilkan argumentasi hukum, bukan untuk menghitung kerugian pasar secara empiris. Tidak ada data transaksi perusahaan atau pengujian ekonometrika aktual yang diklaim dalam artikel ini.

Pembahasan menggunakan pengaturan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 sebagai konteks sektor. Karena perkara dapat menyangkut periode sebelum aturan tersebut berlaku, peraturan terbaru tidak diproyeksikan mundur secara otomatis. Setiap ilustrasi dalam artikel merupakan contoh analitis untuk menunjukkan kebutuhan bukti. Penerapan terhadap perkara tertentu membutuhkan dokumen lengkap mengenai periode, pihak, jenis layanan, dan dasar dugaan pelanggaran. Keterbatasan ini menjaga pemisahan antara pengembangan kerangka akademik dengan penetapan fakta oleh lembaga yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Rule of Reason* dalam Dugaan Kartel Suku Bunga

1. Perbedaan Kartel dalam Pengertian Umum dan Rumusan Pasal

Kartel dalam pengertian ekonomi dapat menunjuk koordinasi antarpesaing untuk mengurangi persaingan. Namun, istilah umum tersebut tidak menghilangkan kebutuhan memilih ketentuan hukum secara tepat. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Pasal 11 mempunyai konstruksi berbeda, yakni perjanjian yang bermaksud memengaruhi harga melalui pengaturan produksi atau pemasaran barang dan dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi khusus bagi penelitian mengenai fintech. LPBBTI berhubungan dengan jasa, sedangkan rumusan Pasal 11 menggunakan istilah barang. Peneliti tidak sepatutnya menganggap kedua istilah dapat dipertukarkan tanpa argumentasi. Apabila analisis diarahkan pada Pasal 11, harus dijelaskan dasar penafsiran mengenai objek dan bentuk pengaturan yang dipersoalkan. Jika substansi dugaan justru berupa kesepakatan harga jasa,

Pasal 5 perlu diperiksa secara tersendiri. Ketelitian memilih norma mencegah unsur yang tidak sesuai dipaksakan hanya untuk mempertahankan pendekatan tertentu.

Judul penelitian yang menggunakan rule of reason tetap dapat dipertahankan sebagai pertanyaan akademik mengenai tempat dan batas pendekatan tersebut. Judul tidak perlu dibaca sebagai kesimpulan bahwa setiap kartel suku bunga wajib diputus dengan pendekatan yang sama. Dalam artikel ini, penerapan rule of reason dinilai secara bersyarat mengikuti rumusan norma. Posisi tersebut memungkinkan penelitian membahas relevansi penilaian akibat sambil tetap menyatakan apabila dasar hukum tertentu menuntut metode yang berbeda. Konsistensi penelitian ditentukan oleh argumentasi, bukan keseragaman istilah.

Jawani membahas rule of reason dalam kaitannya dengan Pasal 11 dan akibat yang menghambat persaingan. Pembahasan tersebut memberi landasan untuk menilai dampak perilaku dalam kategori larangan yang mengandung unsur akibat. Namun, penulis tidak memperluas kesimpulan itu menjadi aturan tunggal bagi seluruh bentuk kesepakatan harga. Perbedaan unsur tetap menjadi batas penggunaan konsep dalam artikel ini.

2. Fungsi analisis ekonomi dalam dua pendekatan

Dalam pendekatan per se illegal, pembuktian tidak berarti cukup menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mengenakan angka tarif yang sama. Unsur perjanjian, hubungan antarpesaing, harga, dan pasar yang relevan tetap perlu dibuktikan sesuai ketentuan. Yang dibedakan ialah kebutuhan menilai akibat atau pembenaran ekonomi sebagai bagian dari penentuan pelanggaran. Karena itu, istilah per se tidak membenarkan putusan berdasarkan dugaan yang tidak teruji. Penyederhanaan penilaian akibat tidak identik dengan penghapusan pembuktian mengenai perilaku yang dilarang.

Analisis ekonomi dapat membantu menilai apakah perilaku lebih masuk akal sebagai hasil koordinasi atau keputusan independen. Fungsi ini berada pada pembuktian keberadaan perjanjian. Sebaliknya, analisis perubahan harga, keluaran, atau pilihan konsumen dapat digunakan untuk menilai dampak antipersaingan apabila norma menghendakinya. Sebuah grafik yang sama dapat dipakai untuk pertanyaan berbeda, tetapi alasan penggunaannya harus disebutkan. Tanpa pemisahan itu, pembaca putusan sulit mengetahui apakah unsur kesepakatan telah dibuktikan atau hanya diasumsikan dari suatu hasil pasar.

Perdebatan yang dikemukakan Aryadiputra dan rekan-rekan relevan untuk menjaga transparansi alasan hukum. Kehadiran bukti ekonomi tidak cukup dijadikan alasan untuk menyebut suatu putusan menggunakan rule of reason. Menurut analisis penulis, penggolongan pendekatan harus dilihat dari unsur yang diuji dan fungsi bukti dalam pertimbangan, bukan semata-mata dari adanya tabel harga atau pendapat ahli ekonomi.

Apabila pendekatan rule of reason relevan, pemeriksaan perlu menerangkan mekanisme yang menghubungkan pembatasan dengan kerugian persaingan. Pernyataan bahwa tarif tinggi merugikan masyarakat masih terlalu umum. Pertanyaan yang harus dijawab ialah apakah koordinasi mengurangi tekanan untuk menurunkan tarif, menghalangi penawaran yang lebih murah, membatasi pilihan, atau mempertahankan biaya yang tidak akan bertahan dalam persaingan independen. Penjelasan mekanisme ini merupakan dasar untuk menentukan data yang diperlukan. Dengan demikian, pembuktian berangkat dari hipotesis yang jelas dan terbuka untuk diuji.

3. Suku bunga dan total biaya pendanaan

SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 menempatkan manfaat ekonomi dalam lingkup yang mencakup bunga atau imbal hasil serta komponen biaya tertentu. Oleh sebab itu, penggunaan istilah suku bunga dalam artikel perlu dipahami dengan perhatian terhadap total beban pendanaan. Dua produk dapat mencantumkan bunga berbeda tetapi mempunyai biaya keseluruhan yang berdekatan. Sebaliknya, kesamaan bunga yang ditampilkan dapat menyembunyikan perbedaan biaya

administrasi, tenor, atau cara pembayaran. Perbandingan harga perlu menjelaskan komponen yang dimasukkan dan yang dikeluarkan.

Penulis mengusulkan pengumpulan data pada tingkat transaksi atau penawaran yang benar-benar sebanding. Informasi minimum meliputi nilai dana diterima, jumlah kewajiban, tenor, waktu pembayaran, komponen biaya, dan profil risiko yang digunakan dalam penetapan harga. Data promosi dapat dipakai untuk memahami pemasaran, tetapi tidak selalu mencerminkan harga yang benar-benar dibayar pengguna. Penggunaan rata-rata sederhana tanpa mengetahui komposisi transaksi dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Perusahaan dengan lebih banyak peminjam berisiko tinggi mungkin mempunyai rata-rata tarif lebih besar tanpa membuktikan koordinasi.

Sebagai ilustrasi, dua platform dapat mempublikasikan bunga harian yang sama, tetapi salah satunya memungut biaya awal lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut, kesamaan angka publik tidak berarti kesamaan harga ekonomi. Sebaliknya, setelah seluruh arus pembayaran dihitung secara sebanding, mungkin terlihat bahwa beberapa platform mempunyai struktur biaya yang berubah serentak. Temuan hipotetis terakhir merupakan alasan untuk pemeriksaan lanjutan, bukan bukti final kesepakatan. Analisis harus kembali menghubungkannya dengan pengambilan keputusan dan komunikasi yang relevan.

Pengubahan tarif harian menjadi ukuran tahunan juga memerlukan kejelasan asumsi. Perkalian sederhana, penggandaan bunga, dan perhitungan berdasarkan arus kas dapat menghasilkan angka yang berbeda. Tidak semua produk memungkinkan pengguliran pinjaman atau mempunyai pola pembayaran sama. Dalam usulan metodologis artikel ini, laporan analisis menjelaskan dasar perhitungan dan memberikan hasil pada ukuran yang dapat dibandingkan. Tujuannya bukan memilih angka yang paling besar, melainkan memastikan bahwa perbedaan atau kesamaan harga mempunyai arti yang dapat diuji oleh para pihak.

4. Batas regulator dan kebebasan menentukan harga

Batas maksimum merupakan batas atas, sehingga perlu dibedakan dari perintah menggunakan tarif tertentu. Selama pengaturan yang relevan menyisakan ruang penetapan harga di bawah batas, ruang itu tetap perlu diperiksa sebagai wilayah keputusan usaha. Akan tetapi, keberadaan ruang tersebut juga tidak membuktikan bahwa semua penyelenggara wajib memilih angka yang berbeda. Kesamaan dapat timbul karena pertimbangan biaya dan risiko yang berdekatan. Pengujian persaingan harus menilai apakah keputusan mandiri digantikan oleh komitmen bersama yang membatasi pilihan.

Jika perusahaan menyatakan tindakannya merupakan pelaksanaan ketentuan regulator, berkas perlu menunjukkan norma, periode berlaku, pihak yang terikat, dan isi kewajiban secara tepat. Penjelasan lisan mengenai arahan regulator perlu dibedakan dari keputusan yang mempunyai dasar kewenangan. Penulis menilai bahwa ketepatan dokumentasi melindungi kedua sisi: perusahaan dapat membuktikan kewajiban yang benar-benar harus dipatuhi, sedangkan pemeriksa dapat mengidentifikasi bagian perilaku yang masih berasal dari pilihan swasta. Penyebutan istilah kepatuhan saja belum menyelesaikan analisis.

Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai tindakan atau perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan memerlukan pembacaan yang cermat. Pengecualian tidak seharusnya ditarik hanya karena suatu industri berada di bawah pengawasan regulator. Hubungan antara tindakan konkret dan ketentuan yang dilaksanakan harus ditunjukkan. Dalam analisis artikel ini, persoalannya ialah apakah koordinasi yang diperiksa memang diperlukan oleh norma atau merupakan keputusan tambahan antarpelaku usaha. Jawaban harus berdasarkan dokumen yang relevan, bukan anggapan bahwa pengawasan sektor meniadakan hukum persaingan.

5. Kedudukan asosiasi dan penyelenggara

Asosiasi dapat mempunyai fungsi yang sah, seperti pendidikan kepatuhan, pembahasan standar layanan, dan koordinasi mengenai keamanan. Keanggotaan atau kehadiran dalam rapat tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam kartel. Pemeriksaan perlu melihat agenda, materi yang dipertukarkan, keputusan, serta tindak lanjut masing-masing peserta. Sebuah pertemuan dapat membicarakan perubahan aturan tanpa berisi kesepakatan harga. Sebaliknya, rapat dengan agenda umum dapat memuat pembahasan sensitif yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Arti bukti ditentukan oleh isinya dan hubungan dengan perilaku berikutnya.

Anggraini membahas pertukaran informasi dan praktik yang memudahkan koordinasi sebagai bagian dari penilaian bukti kartel. Implikasi konseptualnya ialah perlunya membedakan informasi kepatuhan yang dapat dibagikan dari informasi strategi harga yang belum dipublikasikan. Artikel ini mengembangkan pembedaan tersebut untuk memeriksa apakah forum bersama mengurangi ketidakpastian persaingan mengenai keputusan harga perusahaan.

Pertanggungjawaban setiap penyelenggara tetap perlu diindividualisasikan. Berkas harus menjelaskan apakah perusahaan menyetujui, melaksanakan, mengawasi, atau justru menolak suatu keputusan. Tidak semua anggota asosiasi memiliki posisi dan akses yang sama. Penulis mengusulkan pemetaan kronologi per perusahaan agar penilaian tidak bertumpu pada daftar keanggotaan. Dokumen penolakan, kebijakan harga internal, dan bukti transaksi di bawah angka yang diduga disepakati harus diperiksa bersama bukti yang memberatkan. Pendekatan ini membantu menjaga ketepatan atribusi perilaku tanpa menutup kemungkinan koordinasi melalui organisasi bersama.

B. Parameter Pembuktian Kartel Suku Bunga Fintech

1. Penentuan Pasar dan Teori Kerugian Persaingan

Pasar bersangkutan tidak dapat ditentukan hanya dengan menggunakan label fintech atau pinjaman daring. Analisis perlu memeriksa jenis kebutuhan pendanaan, jangka waktu, nilai transaksi, syarat akses, dan pilihan lain yang benar-benar tersedia bagi pengguna. Kredit bank mungkin menjadi alternatif bagi sebagian pengguna, tetapi belum tentu bagi kelompok yang tidak memenuhi syarat akses. Sebaliknya, menyatakan seluruh layanan digital sebagai pasar tersendiri tanpa bukti substitusi juga terlalu cepat. Batas pasar merupakan hasil analisis terhadap perilaku dan pilihan yang relevan.

Dalam usulan penulis, sisi penerima dana dan sisi pemberi dana diperiksa secara terhubung. Penyelenggara memfasilitasi hubungan di antara keduanya, sehingga perubahan biaya atau insentif pada satu sisi dapat memengaruhi sisi lain. Namun, hubungan tersebut tidak berarti seluruh pihak mempunyai fungsi harga yang identik. Berkas perlu menjelaskan komponen yang ditentukan penyelenggara dan komponen yang terkait keputusan pemberi dana. Kejelasan struktur transaksi membantu menentukan siapa pesaing dalam dugaan kesepakatan dan harga siapa yang sebenarnya sedang diperiksa.

Wilayah pasar juga memerlukan alasan. Aplikasi yang dapat diakses secara nasional belum tentu mempunyai jangkauan layanan efektif yang sama bagi setiap pengguna. Persyaratan administratif, segmentasi, dan dukungan operasional dapat memengaruhi akses. Di sisi lain, membagi pasar berdasarkan lokasi kantor perusahaan dapat mengabaikan sifat layanan digital. Penulis menyarankan penggunaan bukti mengenai daerah layanan dan pola penggunaan, disertai penjelasan mengapa hambatan tertentu membuat alternatif tidak realistis. Pendekatan ini menghindari penetapan pasar yang semata-mata mengikuti bentuk organisasi perusahaan.

Teori kerugian kemudian dirumuskan berdasarkan mekanisme yang diduga. Jika masalahnya berupa penyamaan biaya minimum, bukti perlu diarahkan pada hilangnya kemampuan menawarkan harga lebih rendah. Jika berupa pertukaran rencana harga, pemeriksaan perlu menjelaskan bagaimana informasi itu memudahkan penyesuaian bersama. Jika terkait pembatasan promosi, akibatnya dapat menyentuh pilihan dan diskon. Perbedaan mekanisme menghasilkan kebutuhan

bukti yang berbeda. Karena itu, satu kumpulan grafik tarif tidak seharusnya dipakai untuk mendukung semua bentuk dugaan tanpa penjelasan hubungan yang khusus.

2. Bukti langsung dan keterkaitan dokumen

Bukti langsung mengenai kesepakatan dapat berupa dokumen atau komunikasi yang secara jelas menunjukkan komitmen bersama, sepanjang keaslian dan konteksnya dapat dinilai. Notulen yang menyebut pembahasan tarif perlu dibaca secara utuh: apakah para peserta hanya menerima informasi atau mengambil keputusan bersama? Pesan yang berisi usulan belum tentu menunjukkan penerimaan. Tanda tangan dapat membantu mengidentifikasi persetujuan, tetapi arti dokumennya tetap harus diperiksa. Penilaian bukti tidak dapat berhenti pada satu kata yang tampak mencurigakan ketika dipisahkan dari rangkaian komunikasi.

Dokumen internal membantu menelusuri hubungan antara komunikasi eksternal dengan kebijakan perusahaan. Catatan rapat komite, persetujuan perubahan tarif, dan waktu pembaruan aplikasi dapat menunjukkan jalur keputusan. Jika perusahaan mengubah harga sebelum pertemuan yang dituduhkan sebagai sumber kesepakatan, kronologi itu mempunyai arti pembuktian. Sebaliknya, perubahan serentak setelah keputusan bersama dapat memperkuat dugaan apabila didukung isi komunikasi yang sesuai. Penulis mengusulkan penyusunan garis waktu yang menghubungkan peristiwa dan keputusan agar hubungan sebab-akibat tidak hanya diasumsikan.

Keaslian data elektronik memerlukan perhatian terhadap asal, kelengkapan, dan cara perolehan. Salinan percakapan perlu dikaitkan dengan akun, peserta, tanggal, serta konteks yang memadai. Ekspor data transaksi harus disertai penjelasan struktur dan perubahan yang dilakukan selama pengolahan. Informasi yang tidak tersedia atau tidak lengkap perlu disebutkan secara terbuka. Ketidaklengkapan tidak selalu membuat data tidak berguna, tetapi memengaruhi batas kesimpulan. Jaminan pengujian ini penting ketika keputusan dapat menimbulkan akibat besar bagi perusahaan dan pengguna layanan.

3. Bukti tidak langsung dan penjelasan alternatif

Bukti tidak langsung bekerja melalui penalaran dari sejumlah keadaan menuju kesimpulan mengenai kesepakatan. Jawani menghubungkan pembuktian kartel dengan bukti komunikasi dan ekonomi. Bagi artikel ini, penggabungan tersebut bukan rumus mekanis bahwa dua kategori bukti selalu menghasilkan pelanggaran; yang diperlukan ialah penjelasan bagaimana masing-masing keadaan saling menguatkan dan mengurangi kemungkinan penjelasan lain.

Kesamaan tarif merupakan satu keadaan yang dapat diperiksa, tetapi mempunyai lebih dari satu penjelasan. Perusahaan dapat merespons perubahan biaya dana, risiko gagal bayar, batas regulator, atau kondisi permintaan yang sama. Perilaku paralel juga mungkin lahir dari pengamatan terhadap harga pesaing yang telah dipublikasikan. Karena itu, dugaan koordinasi perlu didukung faktor tambahan yang relevan, misalnya pertukaran rencana harga nonpublik atau mekanisme pemantauan kepatuhan terhadap kesepakatan. Faktor tambahan tidak boleh hanya mengulang keadaan yang sudah disebut sebagai kesamaan harga.

Pengujian alternatif dilakukan secara substantif. Jika perusahaan menjelaskan kenaikan tarif disebabkan peningkatan risiko, pemeriksa perlu melihat ukuran risiko yang digunakan dan apakah perubahan konsisten dengan data. Jika alasannya perubahan biaya dana, diperiksa waktu serta besarnya perubahan biaya tersebut. Penjelasan tidak cukup diterima karena terdengar masuk akal, tetapi juga tidak layak ditolak tanpa pengujian. Dalam kerangka penulis, mutu kesimpulan ditentukan oleh kemampuan menunjukkan mengapa suatu penjelasan lebih sesuai dengan keseluruhan bukti dibandingkan kemungkinan lainnya.

Anggraini menegaskan perlunya faktor tambahan dan bukti yang saling melengkapi ketika bukti ekonomi digunakan. Artikel ini mengembangkan gagasan tersebut sebagai kewajiban argumentatif untuk menerangkan konsistensi hubungan

bukti. Banyaknya dokumen tidak selalu memperbesar kekuatan pembuktian apabila seluruhnya berasal dari informasi dasar yang sama. Penggandaan salinan atau pengulangan satu dugaan dalam beberapa laporan tidak boleh diperlakukan sebagai dukungan yang independen.

4. Analisis akibat dan perbandingan yang layak

Dalam penerapan *rule of reason* yang relevan, keadaan pasar dibandingkan dengan kondisi tanpa pembatasan yang dipersoalkan. Kondisi perbandingan bukan dunia tanpa regulasi, risiko, atau biaya operasional. Ia harus mempertahankan faktor yang memang tetap ada meskipun koordinasi tidak terjadi. Kesalahan membentuk perbandingan dapat membuat semua biaya pendanaan tampak sebagai kerugian akibat kartel. Penulis menilai bahwa analisis perlu menjelaskan asumsi mengenai bagaimana harga akan ditentukan secara mandiri dalam batas regulasi dan kondisi bisnis yang sama.

Perbandingan sebelum dan sesudah perubahan kebijakan dapat membantu, tetapi tidak cukup jika pada saat yang sama terjadi perubahan profil pengguna atau biaya pendanaan. Perbandingan antarpengelola menghadapi persoalan serupa apabila segmen usahanya berbeda. Oleh sebab itu, pemilihan kelompok perbandingan perlu dijelaskan secara terbuka. Analisis dapat memakai beberapa cara perbandingan dan menilai apakah kesimpulannya tetap searah. Rekomendasi metodologis ini tidak menyatakan bahwa satu metode statistik tertentu diwajibkan hukum; tujuannya menjaga kesesuaian antara pertanyaan dan alat analisis.

Jika digunakan model ekonometrika, pihak yang mengajukannya perlu menerangkan data, asumsi, variabel, periode, dan keterbatasan. Hasil yang tampak presisi tidak menghilangkan masalah data yang tidak sebanding atau faktor penting yang diabaikan. Ahli perlu menjelaskan arti hasil bagi unsur yang sedang dibuktikan. Perbedaan signifikan secara statistik juga tidak otomatis menunjukkan adanya perjanjian. Model dapat membantu menilai pola dan akibat, sedangkan kesimpulan hukum tetap membutuhkan hubungan dengan keseluruhan bukti mengenai perilaku dan pihak yang bertanggung jawab.

5. Penilaian efisiensi dan alternatif yang lebih ringan

Pembenaran berupa efisiensi harus ditempatkan sesuai pendekatan dan dasar pasal. Dalam pengujian *rule of reason*, klaim bahwa kerja sama menurunkan biaya atau meningkatkan keamanan perlu dijelaskan melalui manfaat yang dapat diperiksa. Istilah stabilitas industri atau inklusi keuangan belum cukup jika tidak diterangkan bagaimana pembatasan tertentu diperlukan untuk mencapainya. Penulis mengusulkan pemisahan antara manfaat dari kerja sama yang sah dan manfaat yang diklaim timbul dari pembatasan harga. Pemisahan itu penting agar tujuan baik tidak menutupi instrumen yang tidak diperlukan.

Sebagai contoh analitis, pertukaran informasi mengenai pola penipuan dapat mempunyai tujuan perlindungan pengguna. Akan tetapi, tujuan tersebut belum menjelaskan mengapa peserta harus menyepakati biaya pendanaan. Pemeriksaan dapat menilai apakah tujuan keamanan dapat dicapai melalui berbagi indikator risiko yang sesuai tanpa membuka rencana tarif. Pertanyaan mengenai alternatif yang lebih sedikit membatasi persaingan membantu menguji kebutuhan pembatasan. Artikel tidak menyatakan setiap alternatif harus diterima; yang diperlukan ialah alasan mengapa pilihan lain memadai atau tidak memadai dalam kondisi yang diperiksa.

Manfaat bagi perusahaan juga perlu dibedakan dari manfaat bagi pengguna. Koordinasi yang memudahkan perencanaan pendapatan belum tentu memperbaiki persaingan. Jika suatu efisiensi diklaim menurunkan biaya layanan, perlu ditunjukkan mekanisme penyalurannya kepada pengguna dan hubungan dengan pembatasan yang dinilai. Dalam pendekatan ini, penilaian tetap berbasis bukti dan tidak menjadikan keberlangsungan laba perusahaan sebagai satu-satunya ukuran. Persaingan yang sehat melindungi proses penawaran yang independen, bukan menjamin bahwa seluruh model usaha memperoleh hasil yang sama.

6. Hak membantah dan kualitas pertimbangan

Pelaku usaha perlu memperoleh kesempatan memeriksa serta membantah dasar analisis yang digunakan terhadapnya menurut tata cara yang berlaku. Ketika kesimpulan ditarik dari data gabungan industri, diperlukan pengaturan akses yang menjaga rahasia usaha tanpa menghilangkan kemungkinan pengujian yang bermakna. Penulis mengusulkan penyajian data yang dianonimkan atau akses terbatas apabila dibenarkan prosedur. Kerahasiaan tidak seharusnya berubah menjadi alasan untuk menutup seluruh asumsi model atau ringkasan bukti yang menentukan hasil pemeriksaan.

Kewajiban memberikan penjelasan tandingan tidak boleh disamakan dengan kewajiban membuktikan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan koordinasi. Pihak yang mengajukan dugaan harus menjelaskan dasar yang cukup untuk menghubungkan bukti dengan unsur pelanggaran. Setelah dasar itu disajikan, tanggapan perusahaan dinilai terhadap persoalan yang konkret. Kerangka ini menjaga agar perbedaan kapasitas informasi tidak menghasilkan praduga kesalahan yang tidak dapat dipatahkan. Kesulitan menemukan perjanjian tidak membenarkan penghilangan hak untuk menguji inferensi yang digunakan dalam pembuktian.

Pertimbangan akhir sebaiknya disusun menurut unsur dan perusahaan. Untuk setiap unsur dijelaskan bukti pendukung, tanggapan, serta alasan menerima atau menolaknya. Apabila analisis ekonomi hanya dipakai untuk membantu membuktikan kesepakatan, fungsi itu dinyatakan secara tegas. Apabila digunakan untuk menilai akibat, dijelaskan pasar, kondisi pembanding, dan mekanisme kerugian. Penjelasan terstruktur ini memudahkan pemeriksaan atas konsistensi putusan dan membantu pelaku usaha memahami perilaku yang harus diperbaiki tanpa menafsirkan sendiri alasan yang tidak tertulis.

C. Kerangka Penerapan dalam Penelitian Perkara Fintech

Kerangka yang ditawarkan dimulai dengan penetapan ruang lingkup: jenis layanan, pihak, periode, dan perilaku yang diduga. Selanjutnya dilakukan pemilihan pasal berdasarkan unsur yang sesuai, termasuk perbedaan harga jasa dan pengaturan yang dimaksud Pasal 11. Tahap ini diikuti pemetaan hubungan antarpesaing dan kewenangan pihak yang menentukan tarif. Urutan tersebut merupakan usulan analitis penulis, bukan pengganti prosedur pemeriksaan KPPU. Tujuannya memastikan bahwa pengumpulan bukti menjawab pertanyaan hukum yang sudah dirumuskan dengan jelas.

Tahap berikutnya menghubungkan komunikasi dengan keputusan perusahaan dan data transaksi. Tarif dinormalisasi menggunakan komponen serta periode yang sebanding. Analisis menguji penjelasan independen sebelum menarik inferensi koordinasi. Jika norma memerlukan penilaian akibat, dilakukan pengujian terhadap pasar bersangkutan dan kondisi pembanding. Klaim kepatuhan regulator ditelaah berdasarkan norma dan periode, sedangkan klaim efisiensi diperiksa sesuai relevansinya terhadap pasal. Pada setiap tahap, keterbatasan data dicatat agar kesimpulan tidak melampaui kemampuan bukti yang tersedia.

Kerangka tersebut juga memisahkan tiga kemungkinan hasil. Bukti dapat menunjukkan keputusan mandiri yang selaras dengan regulasi; bukti dapat menunjukkan koordinasi tetapi belum memenuhi seluruh unsur dasar pelanggaran; atau bukti dapat memenuhi unsur larangan yang digunakan. Perbedaan ini mencegah penalaran yang hanya menyediakan pilihan bersalah atau tidak kooperatif. Kualitas pembuktian terletak pada kemampuan menjelaskan posisi masing-masing bukti terhadap unsur, termasuk keadaan ketika informasi belum cukup. Kebutuhan kepastian hukum berlaku bagi pengguna layanan dan pelaku usaha secara bersamaan.

Dalam penyusunan tesis lanjutan, kerangka dapat diterapkan pada satu perkara yang memiliki salinan putusan serta dokumen pendukung yang dapat diperiksa. Peneliti kemudian membandingkan dasar dugaan, konstruksi pembuktian, bantahan, dan pertimbangan lembaga pemutus. Pernyataan mengenai hasil perkara harus dibedakan dari penilaian kritis

peneliti. Artikel ini menyediakan dasar konseptual untuk pekerjaan tersebut tanpa mengisi kekosongan dokumen dengan asumsi. Dengan demikian, pengembangan menuju studi kasus dapat dilakukan secara terarah dan tetap menjaga ketepatan sumber.

KESIMPULAN

Penerapan rule of reason dalam dugaan kartel suku bunga fintech harus mengikuti kualifikasi norma dan fungsi bukti yang digunakan. Pasal 5 mengenai penetapan harga tidak dapat disamakan dengan Pasal 11, termasuk karena terdapat perbedaan unsur dan lingkup objek rumusan. Analisis ekonomi dapat membantu membuktikan perjanjian tanpa otomatis mengubah pendekatan menjadi rule of reason. Kepatuhan terhadap batas manfaat ekonomi serta keanggotaan dalam asosiasi juga tidak cukup untuk membuktikan atau meniadakan pelanggaran. Hubungan tindakan dengan norma regulator dan keputusan masing-masing perusahaan perlu dijelaskan secara konkret.

Pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan membutuhkan penggabungan bukti komunikasi, dokumen keputusan, data biaya pendanaan yang sebanding, dan pengujian penjelasan alternatif. Apabila penilaian akibat diperlukan, pasar bersangkutan, kondisi pembanding, mekanisme kerugian, dan relevansi efisiensi harus diterangkan. Penulis menyarankan penggunaan kerangka pemeriksaan yang membedakan pembuktian kesepakatan dari penilaian akibat, sekaligus menjamin hak pelaku usaha menguji bukti. Dengan cara tersebut, penegakan hukum dapat melindungi persaingan dan pengguna layanan tanpa menyamakan keseragaman tarif dengan kartel secara otomatis.

REFERENSI

- Anggraini, A. M. T. (2013). Penggunaan bukti ekonomi dalam kartel berdasarkan hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 1–23.
- Aryadiputra, D., Pribadi, D. S., & Subroto, A. (2022). Perbedaan penerapan pendekatan per se illegal dan rule of reason dalam putusan KPPU tentang kartel penetapan harga. *Risalah Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.753> (doi.org in Bing)
- Jawani, L. (2021). Prinsip rule of reason terhadap praktik dugaan kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Humaya*, 1(2), 99–106. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021> (doi.org in Bing)
- Usman, R. (2013). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.